



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

STUDI LITERATUR: PENTINGNYA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KETAHANAN NASIONAL

Ika Salsabila Ramdha¹, Marshanda Fitri Amalia², Baiq Ayu Wulan Maharani Putri³, I Gede Eka Surya Buana⁴, Norina Shaumy Putri Rayes⁵

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ikasalsabila7@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, marshandafitri19@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, baiqayu002@gmail.com

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, igedeekasuryabuana@gmail.com

⁵Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, rys.norin@gmail.com

Abstrak: Perkembangan globalisasi yang pesat telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ideologi bangsa Indonesia. Arus informasi dan budaya asing yang tak terseleksi berpotensi melemahkan jati diri bangsa dan menurunkan semangat nasionalisme. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat ketahanan nasional. Manfaat dari kajian ini adalah memberikan pemahaman ilmiah mengenai pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar pertahanan negara. Metode yang digunakan adalah systematic review dengan menelaah 15 jurnal ilmiah dan buku yang relevan dari kurun waktu 2015 hingga 2025, diperoleh melalui Google Scholar. Kriteria seleksi mencakup keterkaitan tema dan aksesibilitas penuh terhadap naskah. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kesadaran nasional, dan memperkuat ketahanan ideologis bangsa. Pembahasan juga menguraikan tantangan internalisasi di tengah derasnya arus globalisasi serta pentingnya strategi penguatan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Kata Kunci: Pancasila, Internalisasi, Ketahanan, Globalisasi, Identitas

*Correspondence Address:	ikasalsabila7@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sudah banyak mengalami pergeseran orientasi dari lingkup domestik menuju tatanan global sebagai akibat dari pengaruh globalisasi. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah membawa dampak luas dalam berbagai aspek seperti dalam bidang teknologi, sosial budaya, ekonomi, politik, hingga pertahanan. Arus informasi dan budaya asing kini mengalir begitu cepat dan luas tanpa melalui proses seleksi atau penyesuaian nilai. Kondisi ini berpotensi melemahkan jati diri bangsa, menurunkan semangat nasionalisme, dan menimbulkan disorientasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda (Azzaria, 2021). Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penguatan nilai-nilai dasar kebangsaan sebagai benteng dalam menjaga keutuhan bangsa.

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus memiliki fondasi ideologis yang kokoh guna menghadapi berbagai gempuran ideologi asing yang dapat memecah belah persatuan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran sentral, bukan hanya sebagai sumber dari segala sumber

hukum, tetapi juga sebagai panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia (Fernando, 2020). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis dalam membangun pertahanan dan keamanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang mencakup kemampuan suatu negara dalam mengelola potensi dan mengatasi ancaman dari dalam maupun luar negeri sangat erat kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Mahmudah et al., 2024). Oleh karena itu, Pancasila menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pada kenyataannya berbagai tantangan terhadap keutuhan bangsa terus bermunculan, terutama dari sisi ideologi. Penyebaran ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila melalui arus informasi global dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dan memperlemah rasa kebangsaan. Meskipun beberapa organisasi yang menganut ideologi bertentangan telah dibubarkan, pengaruh pemikirannya tetap tersebar melalui media dan lingkungan sosial. Ketegangan ideologis ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan stabilitas nasional, sehingga berdampak langsung pada ketahanan negara.

Dalam konteks tersebut, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Proses internalisasi tidak hanya memperkuat karakter individu, tetapi juga membentuk fondasi ideologis bangsa yang kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman. Internalisasi nilai Pancasila merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan nasional, baik dari aspek ideologi, sosial budaya, maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan nasional. Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan studi literatur.

METODE | METHOD

Metode yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini adalah *systematic review*. *Systematic review* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan semua bukti empiris yang memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Lasserson dkk., 2024). *Systematic review* pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka. Pencarian sumber pustaka dilakukan untuk mengambil referensi berupa buku serta jurnal ilmiah yang bersumber dari beberapa literatur yang diambil dari platform Google Scholar. Sumber yang didapatkan berhubungan dengan topik pembahasan tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ketahanan nasional. Adapun kriteria yang digunakan antara lain, jurnal ilmiah yang merupakan naskah publikasi 10 tahun terakhir tahun 2015 hingga 2025 dan dapat diakses secara penuh. Jumlah literatur yang digunakan dalam review jurnal ini sebanyak 15 jurnal dengan kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah Internalisasi nilai-nilai Pancasila, Ketahanan nasional dan Pancasila, Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Setelah artikel terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ketahanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Hasil studi literatur terkait dengan pentingnya internalisasi nilai Pancasila dalam ketahanan nasional menjabarkan poin-poin terkait dengan urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila, peran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa, Pengaruh nilai Pancasila terhadap perilaku sosial, politik, dan budaya masyarakat, serta tantangan dan hambatan internalisasi Pancasila dalam globalisasi. Adapun pembahasan terkait dengan poin-poin tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Urgensi Internalisasi nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan ideologi fundamental bangsa Indonesia yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga dijadikan sebagai pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang paling sesuai dan relevan untuk menuntun keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di tengah dinamika zaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan yang menyeluruh karena memperhatikan berbagai aspek penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, nilai-nilai Pancasila mengalami ketimpangan yang sering kali tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat, sehingga dapat memengaruhi implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Fatimaha dan Dewi, 2021). Menurut pandangan Nurizka dan Rahim (2020), arus globalisasi memberikan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga membawa potensi ancaman yang cukup serius. Peluang yang dimaksud oleh mereka adalah bahwa globalisasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses pertumbuhan ekonomi serta pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan. Akan tetapi, ancaman yang muncul juga tidak bisa diabaikan, di mana hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kekhawatiran akan tergerusnya identitas bangsa Indonesia yang selama ini dijaga melalui nilai-nilai kearifan lokal dan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, dengan menyadari adanya berbagai ancaman yang dapat terjadi akibat pengaruh globalisasi tersebut, maka sangat diperlukan suatu upaya yang serius untuk melakukan penilaian terhadap aspek urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang mencakup beberapa aspek penting di antaranya adalah aspek pendidikan, budaya, sosial, dan kebijakan publik sebagai bentuk konkret dalam menjaga keutuhan jati diri bangsa.

1. Peran nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa

Karakter dan jati diri pada hakikatnya merupakan seperangkat nilai-nilai perilaku manusia yang mencerminkan hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar, serta dengan bangsa dan negaranya. Nilai-nilai tersebut termanifestasi secara konkret dalam bentuk pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang senantiasa berlandaskan pada norma-norma agama, hukum yang berlaku, tata krama, budaya luhur, serta adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para pendahulu bangsa (Aryani et al., 2022). Dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) secara eksplisit menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar dan sistematis dengan tujuan membentuk lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi peserta didik agar dapat berperan aktif dalam mengembangkan karakter pribadi mereka. Karakter tersebut meliputi pengendalian diri yang baik, keluhuran budi pekerti, serta internalisasi nilai-nilai moral yang sangat esensial bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka di masyarakat.

Dalam praktiknya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan secara nyata dalam pendidikan karakter melalui berbagai pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi, baik dalam kurikulum, metode pembelajaran, maupun dalam

aktivitas keseharian di lingkungan sekolah. Nilai ketuhanan atau nilai keilahian, sebagai sila pertama Pancasila, diwujudkan melalui penanaman kesadaran spiritual yang mendalam tentang pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai ini tampak nyata dalam kegiatan pembelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing peserta didik, serta melalui kebiasaan positif seperti doa bersama sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung (Aryani et al., 2022).

Selanjutnya, nilai kemanusiaan diaplikasikan melalui penguatan sikap empati, toleransi, dan saling menghargai, dengan cara mengakui persamaan derajat dan martabat setiap individu sebagai sesama manusia. Contoh nyata dari pengamalan nilai ini adalah pelaksanaan program “salam, senyum, dan sapa” yang bertujuan menciptakan suasana yang ramah dan inklusif di lingkungan sekolah, serta upaya pencegahan terhadap perilaku perundungan yang dapat merusak keharmonisan sosial. Sementara itu, nilai persatuan diterapkan melalui pembentukan semangat kebangsaan yang kuat dan inklusif di kalangan peserta didik, misalnya melalui pelaksanaan upacara bendera secara rutin, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar, serta partisipasi dalam kegiatan yang memupuk cinta tanah air.

Nilai demokrasi sebagai salah satu sila penting dalam Pancasila tercermin dalam praktik pembelajaran yang memberikan ruang partisipasi aktif kepada peserta didik, serta menumbuhkan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara demokratis, serta diskusi kelas yang terbuka dan menghargai kebebasan berpendapat setiap individu. Terakhir, nilai keadilan sosial diterapkan melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh warga sekolah untuk memperoleh hak dan akses pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas sekolah yang dapat digunakan bersama secara adil dan pemerataan bantuan pendidikan seperti beasiswa bagi siswa yang kurang mampu (Aryani et al., 2022).

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan pendidikan karakter, memiliki peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam membentuk karakter serta jati diri bangsa. Nilai-nilai ini menjadi pedoman utama dalam membentuk peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, serta memiliki rasa kepedulian sosial yang kuat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis dan berkeadaban.

2. Pengaruh nilai Pancasila terhadap perilaku sosial, politik, dan budaya masyarakat

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan multidimensional terhadap perilaku sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia, karena kelima sila tersebut sesungguhnya dirancang sebagai rambu-rambu moral sekaligus kerangka etik yang mampu memandu warga negara dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berkembang. Pada aspek sosial, Pancasila—khususnya sila kedua tentang “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila ketiga tentang “Persatuan Indonesia”—mendorong masyarakat untuk senantiasa mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta

menumbuhkan solidaritas melalui tradisi gotong royong yang telah menjadi ciri khas bangsa sejak lama; tradisi ini tampak dalam kegiatan kerja bakti di desa, solidaritas saat bencana alam, dan budaya tolong-menolong antartetangga, yang kesemuanya berfungsi sebagai perekat persatuan di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang majemuk (Dewantara, 2018).

Pada ranah politik, nilai-nilai Pancasila menegaskan pentingnya prinsip demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat—sebagaimana tercermin dalam sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”—sehingga idealnya setiap keputusan politik diambil melalui proses musyawarah yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas; penerapan prinsip ini tidak hanya memperluas ruang partisipasi publik dalam pemilihan umum dan penentuan kebijakan, tetapi juga diharapkan mampu menekan praktik pragmatis seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi yang dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintahan serta para pemimpinnya (Inahasari, 2019).

Dalam konteks kebudayaan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman strategis untuk melestarikan kearifan lokal—contohnya kesenian tradisional, bahasa daerah, upacara adat, dan nilai gotong royong—sekaligus menjadi filter selektif dalam menyaring budaya asing agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa; hal ini berarti kebudayaan global yang bersifat konstruktif, seperti inovasi teknologi atau praktik manajemen modern, dapat diadopsi selama tidak menyingkirkan nilai luhur yang telah berakar kuat, sedangkan elemen-elemen budaya yang berpotensi merusak, misalnya hedonisme ekstrem atau individualisme yang menggerus kepedulian sosial, perlu ditolak atau diadaptasi secara kritis. Dengan kata lain, Pancasila bukan sekadar simbol atau dasar negara, melainkan panduan moral yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera; penerapan konsisten nilai-nilai tersebut akan mendorong tercapainya masyarakat madani yang memiliki keadaban, kepekaan sosial, dan kesadaran politik, sehingga tujuan luhur bangsa—yakni kesejahteraan lahir batin dan kedamaian bersama—dapat diwujudkan secara berkelanjutan (Inahasari, 2019).

3. Tantangan internalisasi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi

Tantangan dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan digitalisasi dewasa ini semakin kompleks, multidimensional, dan mendesak untuk segera ditanggapi secara serius oleh berbagai elemen bangsa, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat secara umum. Globalisasi, sebagai fenomena yang ditandai dengan semakin terbukanya batas-batas antarnegara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi, telah membawa masuk beragam ideologi, gaya hidup, dan budaya asing yang dalam banyak hal sering kali tidak sejalan, bahkan bertentangan secara prinsipil dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Akibat dari penetrasi budaya asing ini adalah terjadinya penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya meningkatnya sikap individualisme, konsumerisme, dan materialisme yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi serta kesenangan duniawi semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan moralitas sosial yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia (Budimansyah, 2010).

Selain globalisasi, tantangan yang tidak kalah besar juga datang dari proses digitalisasi yang begitu pesat dan masif dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Digitalisasi yang ditandai dengan meluasnya penggunaan perangkat digital, internet, dan media sosial memang memberikan berbagai kemudahan dan manfaat dalam mengakses informasi serta berkomunikasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang sangat besar bagi masuknya konten-konten negatif yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku generasi muda. Penyebaran informasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol menjadikan generasi muda rentan terhadap paparan nilai-nilai yang merusak, seperti kekerasan, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, hingga budaya instan yang mengabaikan proses dan nilai kerja keras. Tidak jarang dijumpai bahwa banyak anak-anak dan remaja lebih akrab dan mengenal budaya asing, tokoh-tokoh luar negeri, serta tren global dibandingkan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, atau tokoh nasional yang seharusnya menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan mereka (Yani dan Dewi, 2021).

Oleh karena itu, dalam menghadapi realitas ini, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, terutama lembaga pendidikan formal maupun nonformal, untuk mengembangkan strategi yang inovatif dan efektif dalam menanamkan serta memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila harus dirancang secara kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman, dengan memanfaatkan pendekatan yang menarik dan adaptif, seperti penggunaan media digital edukatif, integrasi nilai dalam kurikulum lintas mata pelajaran, serta penguatan peran guru sebagai teladan moral. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga harus dilakukan secara bijak, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai positif yang mendukung pembangunan karakter, seperti melalui video edukatif, kampanye digital, dan konten kreatif yang mengangkat pentingnya kebangsaan dan moralitas. Dengan demikian, diharapkan generasi muda Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi dengan tetap menjaga jati diri, kepribadian nasional, dan moralitas luhur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah era modern yang terus berubah (Yani dan Dewi, 2021).

B. Tantangan dan hambatan

1. Pengaruh budaya luar dan gaya hidup individualistis

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila semakin hari semakin nyata dan kompleks, terutama akibat pengaruh budaya luar dan berkembangnya gaya hidup individualistis yang merasuki berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Budaya luar, khususnya yang berasal dari negara-negara Barat, sering kali membawa serta nilai-nilai yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai asing seperti materialisme yang menitikberatkan pada pencapaian kekayaan dan status sosial sebagai ukuran kesuksesan hidup, serta hedonisme yang menjadikan kenikmatan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama, perlahan-lahan mengikis semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial

yang sejak dahulu menjadi ciri khas dan kekuatan masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan yang harmonis dan saling mendukung (Reza, H. et al., 2021).

Lebih jauh lagi, gaya hidup individualistis yang kini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda, telah menjadikan individu cenderung lebih mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi daripada memperhatikan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Gaya hidup semacam ini tidak hanya mengurangi kualitas interaksi sosial dan hubungan antarmanusia, tetapi juga melemahkan rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Gejala ini terlihat dari makin berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta semakin dominannya orientasi terhadap pencapaian pribadi, seperti karier, popularitas, dan kekayaan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kultural yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut terhadap tatanan kehidupan bersama (Lestari & Achdiani, 2024).

Fenomena ini tentu menjadi ancaman serius terhadap upaya pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, karena jika dibiarkan tanpa adanya kesadaran dan intervensi, maka identitas budaya bangsa yang dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila dapat terkikis secara perlahan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyadari dan menghadapi tantangan ini secara kolektif dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta melalui keteladanan dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus diarahkan tidak hanya sebagai hafalan atau doktrin, melainkan sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, agar terbentuk karakter bangsa yang kuat, berintegritas, dan memiliki daya tahan budaya di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang terus menguji eksistensi jati diri nasional (Reza, H. et al., 2021; Lestari & Achdiani, 2024).

2. Lemahnya implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik

Tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang signifikan dan memerlukan perhatian yang serius, baik dari pihak pemerintah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Salah satu permasalahan utama yang kerap terjadi adalah lemahnya pemahaman konseptual dan penghayatan praktis terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan para pembuat kebijakan, sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan sering kali tidak mencerminkan semangat dan substansi dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, kebijakan publik yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia justru sering disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, elitis, dan teknokratis, yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, serta mengabaikan kepentingan masyarakat luas (Al Fatih et al., 2023).

Lebih jauh lagi, pengaruh kuat dari kepentingan politik dan ekonomi yang sering kali mendominasi proses perumusan kebijakan juga menjadi hambatan besar dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang seharusnya menjadi

fondasi moral dan arah normatif kebijakan publik, justru kerap tersingkir oleh kepentingan jangka pendek dan kalkulasi politik sempit. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak berorientasi pada keadilan sosial atau kemaslahatan umum, melainkan lebih berpihak pada kekuatan modal atau kelompok elit politik yang memiliki akses dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat nyata, misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana kebijakan yang diberlakukan lebih mengakomodasi kepentingan investor asing, sementara hak-hak masyarakat lokal—terutama masyarakat adat atau komunitas yang secara turun-temurun hidup di sekitar sumber daya tersebut—sering kali diabaikan atau bahkan dirugikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan realitas kebijakan yang terjadi di lapangan (Wijayanto et al., 2022; Al Fatih et al., 2023).

Menyikapi persoalan ini, maka sangat diperlukan adanya upaya yang lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan untuk memperkuat internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses kebijakan publik. Salah satu strategi penting yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat ideologis, etis, dan profesional bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak. Selain itu, perlu pula diterapkan mekanisme evaluasi kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap kebijakan yang disusun dapat dikaji apakah benar-benar berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi keadilan, memperkuat persatuan, dan mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pemerintahan dan kebijakan publik, guna menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, berdaulat, dan bermartabat (Al Fatih et al., 2023; Wijayanto et al., 2022).

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil studi literatur, internalisasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Nilai-nilai Pancasila terbukti berkontribusi dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa, mempengaruhi perilaku sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia secara positif. Di tengah tantangan globalisasi dan penyebaran ideologi asing, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi penting sebagai benteng ideologis dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, internalisasi Pancasila perlu terus ditanamkan melalui pendidikan, media, serta kebijakan publik yang konsisten dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, saran, dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan artikel ini

REFERENSI | REFERENCE

Al Fatih, M.I., Putra, R.S., Hafidza, S.P., Rachman, Y.A.N., Alqanit, Y.H., Nugraha, D.M. dan Ruyadi, Y., 2023. *Masih sulitnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik*. *Inspirat: Inspirasi & Strategi – Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 14(1), pp.123–127. Available at: <https://www.ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat>.

- Aryani, E.D., Fadrijin, N., Azzahro', T.A. and Fitriyono, R.A., 2022. *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter*. Gema Keadilan, 9(III).
- Azzaria, S. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial. *DIKTUM*, 57-74.
- Budimansyah, Dasim. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bangung: Widya Aksara Pers.
- Dewantara, A. (2018). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno).
- Fatimaha, S. dan Dewi, D.A., 2021. *Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter jati diri anak bangsa*. Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1(3), pp.70–76.
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila sebagai ideologi untuk pertahanan dan keamanan nasional pada pandemi covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 46-56.
- Inahasari, E.D., 2019. *Peran Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya*. Pendidikan Pancasila. Surabaya (Kampus Madiun): Universitas Katolik Widya Mandala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen.
- Lestari, R.N. dan Achdiani, Y., 2024. *Pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup individualisme masyarakat modern*. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mahmudah, L. S., & Jaya, A. I. A. (2024). MEMBANGUN KEBANGSAAN YANG KOKOH: URGENSI KETAHANAN NASIONAL DAN PERAN BELA NEGARA. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 32-39.
- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Internalisasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke- SD-an*, 7 (1), 38 – 49
- Reza, H., & Liauw, F. (2021). Hunian Vertikal Monodualisme (Individualisme-Kolektivisme). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1), 1111-1126.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wijayanto, F.N., Sadida, K.F. dan Maharani, I.P.P.A., 2022. *Implementasi ideologi Pancasila dalam kebijakan pemerintah*. *Indigenous Knowledge*, 2(3). Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Yani, D. dan Dewi, D.A., 2021. *Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan tantangan di arus globalisasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), pp.952–961. ISSN: 2614-6754 (print), 2614-3097 (online).